



## Van Dam dan Demokrasi (2)

Nikolaus van Dam kritis dan berimbang melihat hubungan Islam dengan demokrasi serta perspektif perbandingannya dengan Eropa. Sebagai orang yang lahir dan besar di lingkungan Eropa dan banyak mengkaji serta menghabiskan waktu di banyak masyarakat Muslim, van Dam melihat Islam secara empati. Dan karena itu, ia pernah mendapat serangan dari Geert Wilders, pimpinan PVV yang anti-imigran dan anti-Muslim ketika van Dam menyampaikan orasi ilmiah tentang "Politik Global dan Peran Islam: Tanggung Jawab Akademis-Intelektual Islam" di PTIQ Jakarta, 29 April 2009. Karena pandangan kritisnya terhadap kelompok anti-Islam di Eropa, Wilders menuntut Pemerintah Belanda untuk memberhentikannya sebagai dubes Belanda.

Ketika ditanya *The Jakarta Post* tentang kemarahan dan tuntutan Wilders, saya berpendapat seharusnya rakyat Belanda bersyukur memiliki Dubes Nikolaus yang memahami Islam dan masyarakat Muslim. Dengan begitu, ia dapat menjadi jembatan, tidak hanya antara Belanda—tetapi juga dengan Dunia Barat umumnya—dan masyarakat Muslim. Di tengah masih terdapatnya ketegangan antara kedua dunia ini, orang semacam van Dam kian dibutuhkan.

Bahwa van Dam sangat memahami Islam dan masyarakat Muslim di berbagai kawasan dunia tidaklah diragukan lagi. Lancar berbahasa Arab setelah memperoleh gelar PhD dalam kajian Syria, ia menjadi penerjemah ke dalam bahasa Arab. Ia kemudian menjadi staf bagian Timur Tengah di Kemlu Belanda dan selanjutnya ditugaskan ke Kedubes Belanda di Beirut dengan daerah tugas Lebanon, Yordania, wilayah penduduk

Palestina, dan Siprus. Lalu, ia menjadi kuasa usaha Kedubes Belanda di Tripoli, Libya; dubes Belanda di Baghdad; dubes di Kairo; dubes di Ankara; dan akhirnya menjabat dubes Belanda di Jakarta. Seperti ia kemukakan dalam wawancara dengan *Radio Nederland*, "masa bakti di Indonesia merupakan puncak karier saya".

Karena pengalaman luas seperti itu, saya mengusulkan kepadanya agar menulis buku tentang perbandingan masyarakat-masyarakat Muslim yang ia amati; semacam '*Islam Observed*' karya klasik antropolog Clifford Geertz yang membandingkan masyarakat-masyarakat Islam di Indonesia dan Maroko. Jika van Dam menulis karya semacam ini, pasti amat bermanfaat. Tetapi, ketika saya tagih waktu bertemu di Den Haag, ia meminta maaf karena belum punya waktu menuliskannya.

Dengan perspektif perbandingan pula ia melihat masyarakat-masyarakat Islam dan Barat. Kembali pada persoalan Islam dan demokrasi, ia mengajukan pertanyaan terkait: "Apakah masyarakat Kristen Barat (jika kita dapat menyebutnya begitu) demokratis jika berkenaan dengan Islam? Kita menyaksikan berbagai contoh di mana negara-negara Barat, misalnya, mengimbau rakyat Palestina menyelenggarakan pemilu bebas dan demokratis. Ketika hasilnya adalah kemenangan Hamas, negara-negara Barat memboikot hasil pemilu dan menolak berhubungan dengan pemerintahan lokal Hamas. Begitu juga dengan kemenangan FIS di Aljazair yang ditolak militer yang didukung Barat."

Menurut Nikolaus, hal sama juga terjadi dengan media Arab. Pertama-tama, kalangan Barat menekankan mestilah ada kebebasan

ekspresi lebih besar dalam media Arab. Televisi *Aljazeera* di Qatar adalah media (pertama) yang mengisi kesenjangan dengan menyajikan reportase bebas dan kritis yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan. Tetapi, begitu *Aljazeera* mulai kritis terhadap invasi Amerika (dan sekutunya) di Irak pada 2003, siaran TV ini tidak lagi disukai Barat dan dituduh tidak objektif dan partisan. Lebih parah lagi, tentara Amerika ketika melakukan invasi juga mengebom kantor *Aljazeera* di Baghdad sehingga kepala bironya tewas. Begitu juga ketika *Aljazeera* mulai menyiarkan pesan-pesan (Usamah) Bin Ladin—yang kemudian dikutip dan ditayangkan berbagai saluran TV lain di seluruh dunia—ia dituduh sebagai saluran TV yang mendukung teroris.

Akhirnya, van Dam menyimpulkan negara-negara Barat ingin demokrasi dan kebebasan ekspresi terwujud di Dunia Islam; tetapi tidak ketika menghasilkan sesuatu yang mereka tidak sukai. Baginya, salah satu alasan sikap seperti ini adalah kekhawatiran bahwa kekuatan Islam yang menang ke puncak kekuasaan lewat sistem demokrasi 'memanfaatkan' sistem ini untuk kemudian memaksakan kekuasaannya secara tidak demokratis.

Bagi van Dam, kemungkinan terjadinya hal semacam itu tergantung dari kelompok-kelompok Islam yang ada. "Banyak kelompok Islam jelas berorientasi demokratis, seperti organisasi besar Muslim Indonesia semacam Muhammadiyah dan NU yang mewakili bagian terbesar penduduk Indonesia. Tetapi, ada kelompok-kelompok kecil seperti JI dan HTI yang tidak berorientasi demokratis. Mereka ini memanfaatkan sistem demokrasi untuk mencapai tujuan tidak demokratis." ■